

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif pada Bab III mengenai kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar di Kabupaten Kendal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Kinerja Polres Kendal dalam Menangani Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal

Berdasarkan analisis terhadap kinerja Polres Kendal dengan menggunakan indikator kinerja organisasi yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

A. Dimensi Produktivitas

Produktivitas kinerja Polres Kendal tercermin dari berbagai aktivitas penanganan tawuran pelajar yang telah dilaksanakan, seperti patroli rutin dan insidental, penanganan laporan masyarakat, pembubaran aksi tawuran, serta penindakan terhadap pelaku. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Polres Kendal telah menghasilkan output kerja yang nyata dalam merespons fenomena tawuran pelajar. Namun demikian, masih terjadinya tawuran secara berulang dengan pola yang relatif sama menunjukkan bahwa produktivitas tersebut belum

seungguhnya berdampak pada penurunan angka tawuran pelajar secara signifikan. Dengan demikian, produktivitas kinerja Polres Kendal masih belum optimal dalam menekan akar permasalahan tawuran pelajar.

B. Dimensi Kualitas Layanan

Kualitas layanan Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar ditunjukkan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menerima laporan, kehadiran petugas di lokasi kejadian, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua pelajar. Secara umum, masyarakat merasakan adanya layanan kepolisian dalam menangani tawuran pelajar. Namun, kualitas layanan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, konsistensi tindakan, serta pemerataan layanan di wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan tawuran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

C. Dimensi Responsivitas

Responsivitas Polres Kendal tercermin dari kemampuan dan kesigapan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan serta merespons kejadian tawuran pelajar. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Kendal relatif cepat dalam mendatangi lokasi kejadian dan melakukan tindakan pengamanan. Namun demikian, responsivitas tersebut masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan personel, kondisi

geografis dan lalu lintas, serta pola tawuran pelajar yang bersifat terorganisasi dan memanfaatkan media sosial.

D. Dimensi Responsibilitas

Responsibilitas Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prosedur kepolisian. Penanganan terhadap pelaku tawuran, khususnya yang masih di bawah umur, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Kendal telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, keterbatasan kewenangan serta kompleksitas regulasi terkait pelaku di bawah umur menjadi tantangan dalam pelaksanaan responsibilitas secara maksimal.

E. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Polres Kendal tercermin dari adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, baik kepada pimpinan institusi maupun kepada masyarakat. Bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui pelaporan kegiatan, dokumentasi penanganan kasus, serta koordinasi internal dan eksternal. Meskipun mekanisme akuntabilitas telah berjalan, transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar dapat semakin diperkuat.

4.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Polres Kendal dalam Menangani Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar di Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap optimal atau tidaknya pelaksanaan tugas kepolisian.

A. Faktor-faktor Pendukung Kinerja Polres Kendal

1. Faktor Teknologi

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar. Penggunaan teknologi komunikasi, media sosial, serta sistem informasi kepolisian membantu aparat dalam menerima laporan masyarakat, memantau situasi keamanan, dan mempercepat koordinasi antarunit. Teknologi juga mendukung proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan kepolisian, sehingga membantu pelaksanaan tugas secara lebih terstruktur.

2. Faktor Budaya Organisasi

Budaya organisasi di lingkungan Polres Kendal yang menekankan pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penanganan tawuran pelajar. Adanya komitmen aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mendorong pelaksanaan tugas secara konsisten, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan di lapangan.

3. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan di Polres Kendal berperan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan kinerja anggota. Pimpinan berfungsi sebagai pengambil keputusan, pemberi arahan, serta teladan bagi anggota dalam menjalankan tugas. Kepemimpinan yang tegas dan komunikatif mendukung koordinasi internal serta mendorong anggota untuk tetap menjalankan tugas penanganan tawuran pelajar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Faktor Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia di Polres Kendal, termasuk sistem pembinaan, pemberian penghargaan, dan promosi jabatan, menjadi faktor pendukung kinerja organisasi. Mekanisme tersebut mendorong motivasi kerja anggota untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan bertanggung jawab, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan dukungan dan koordinasi dari tingkat kepolisian yang lebih tinggi.

B. Faktor-faktor Penghambat Kinerja Polres Kendal

1. Faktor Kualitas Input/Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah personel serta beban tugas yang tinggi menjadi faktor penghambat utama kinerja Polres Kendal. Jumlah anggota yang belum sebanding dengan luas wilayah hukum dan intensitas kejadian tawuran pelajar berdampak pada keterbatasan patroli, pengawasan, dan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. Selain itu, masih ditemukannya laporan masyarakat yang tidak akurat turut menyulitkan proses penanganan di lapangan.

2. Faktor Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki titik-titik tertentu sebagai lokasi rawan tawuran menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Kendal. Kondisi geografis, jarak antarwilayah, serta situasi lalu lintas pada waktu tertentu menghambat kecepatan mobilisasi personel dan efektivitas penanganan tawuran pelajar, terutama ketika kejadian berlangsung secara tiba-tiba.

3. Faktor Teknologi (Sebagai Tantangan)

Di samping sebagai faktor pendukung, teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan tawuran pelajar. Media sosial kerap dimanfaatkan oleh pelajar untuk mengatur pertemuan, menentukan lokasi, dan menghindari pengawasan aparat. Pola ini menyulitkan kepolisian dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan secara maksimal.

4. Faktor Regulasi dan Batasan Kewenangan (Implikasi Pengelolaan SDM)

Penanganan pelaku tawuran yang sebagian besar masih berstatus pelajar dan di bawah umur menghadirkan keterbatasan bagi aparat kepolisian. Regulasi terkait perlindungan anak membatasi penerapan sanksi pidana secara tegas, sehingga penanganan lebih diarahkan pada pembinaan. Kondisi ini menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera dan berdampak pada berulangnya kasus tawuran pelajar.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar di Kabupaten Kendal, khususnya terkait berbagai faktor penghambat yang telah diidentifikasi, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

4.2.1 Saran bagi Polres Kendal

1. Mengubah pola patroli dari jadwal tetap menjadi patroli berbasis data intelijen waktu nyata

Jadwal patroli yang bersifat tetap terbukti mudah diantisipasi oleh pelaku, sehingga tindakan kepolisian cenderung tertinggal dari pola pergerakan kelompok tawuran. Polres Kendal perlu beralih ke pola patroli berbasis analisis intelijen harian, di mana titik dan waktu patroli ditentukan secara dinamis berdasarkan hasil pemantauan media sosial dan laporan lapangan terkini. Pendekatan ini akan menuju respons yang lebih adaptif dan prediktif tanpa memerlukan penambahan personel.

2. Menetapkan protokol pemantauan lanjutan pascapembinaan yang mengikat Pembinaan terhadap pelajar yang terlibat tawuran belum diikuti dengan mekanisme pemantauan yang sistematis, sehingga berpotensi tidak berkelanjutan. Polres Kendal perlu menetapkan protokol pemantauan lanjutan yang mengikat, melalui komitmen tertulis antara pelajar, orang tua, dan pihak sekolah, serta kewajiban Bhabinkamtibmas untuk melakukan pemantauan berkala dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini bertujuan

memastikan bahwa proses pembinaan tidak berhenti pada intervensi awal, tetapi berlanjut hingga perubahan perilaku dapat terpantau.

3. Penguatan Koordinasi dengan Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Dalam rangka mengatasi keterbatasan kewenangan terhadap pelaku tawuran yang masih di bawah umur, Polres Kendal perlu memperkuat koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, serta tokoh masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perilaku pelajar serta mendorong peran aktif lingkungan sekitar dalam pencegahan tawuran pelajar.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja secara berbasis hasil

Upaya penanganan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan penyampaian informasi yang terukur dan berbasis hasil kepada publik. Polres Kendal disarankan untuk menyusun laporan kinerja berkala yang tidak hanya memuat kegiatan, tetapi juga capaian dan dampaknya terhadap penurunan kasus. Transparansi ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian.

4.2.2 Saran bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait

1. Membangun sistem pemantauan siswa berisiko lintas sekolah

Keterlibatan pelajar dalam tawuran bersifat lintas sekolah dan lintas wilayah, sehingga membutuhkan sistem pemantauan yang terintegrasi. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu mengembangkan basis

data siswa berisiko yang dapat digunakan sebagai dasar koordinasi dengan kepolisian dan sekolah dalam menentukan prioritas intervensi.

2. Mengisi ruang waktu rawan dengan kegiatan remaja yang terstruktur

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan mendukung program pembinaan remaja yang berorientasi pada pengembangan karakter, kegiatan positif, dan pengendalian perilaku menyimpang. Program tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pihak kepolisian serta institusi pendidikan.

3. Dukungan Sarana dan Prasarana Keamanan

Pemerintah daerah disarankan untuk memberikan dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana keamanan, seperti penerangan jalan dan fasilitas pendukung lainnya pada wilayah rawan tawuran. Dukungan tersebut akan membantu meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.3 Saran bagi Masyarakat dan Institusi Pendidikan

1. Menginstitutionalisasikan pemantauan aktivitas digital siswa berisiko sebagai bagian dari tugas guru BK yang dilakukan secara berkala, didokumentasikan, dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian apabila ditemukan indikasi potensi konflik.
2. Memperkuat komitmen pengawasan orang tua di luar jam sekolah melalui mekanisme pernyataan tertulis serta komunikasi aktif antara sekolah dan

orang tua, khususnya dalam mengendalikan aktivitas pelajar pada malam hari yang rawan terjadinya tawuran.

3. Memperkuat komunikasi dengan pihak kepolisian. Pihak sekolah disarankan untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Polres Kendal dalam melaporkan potensi konflik atau indikasi tawuran pelajar. Kerja sama ini penting sebagai upaya pencegahan dini dan penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif.

4.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Pengembangan Perspektif Kajian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian penanganan tawuran pelajar dengan menggunakan perspektif yang lebih luas dan multidisipliner, seperti kriminologi, sosiologi, psikologi remaja, dan kebijakan publik. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam faktor penyebab, pola perilaku, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya tawuran pelajar.

2. Penggunaan Metode Penelitian yang Lebih Beragam

Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara empiris hubungan antara kinerja aparat kepolisian, kebijakan pencegahan, dan tingkat kejadian tawuran pelajar. Pemanfaatan data statistik, survei persepsi masyarakat, serta analisis tren kejadian tawuran dari waktu ke waktu akan meningkatkan validitas dan kekuatan generalisasi temuan penelitian.

3. Pendalaman Kajian pada Peran Teknologi dan Media Sosial

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memfokuskan perhatian pada peran teknologi dan media sosial, baik sebagai faktor pemicu maupun sebagai sarana pencegahan tawuran pelajar. Kajian terhadap efektivitas *cyber patrol*, sistem deteksi dini berbasis digital, serta strategi pengawasan dunia maya dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih adaptif.

4. Studi Komparatif Antarwilayah atau Antarinstansi

Penelitian lanjutan dapat melakukan studi perbandingan antarwilayah atau antarinstansi kepolisian dalam menangani tawuran pelajar. Pendekatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) serta faktor-faktor keberhasilan yang dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan kinerja kepolisian dan perumusan kebijakan penanganan tawuran pelajar secara berkelanjutan.